

RINGKASAN

**ALDI PRAYOGI
180510209**

**PERAN POLISI RESORT LHOKSEUMAWE
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENADAHAN**

**(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. dan Ferdy
Saputra, S.H., M.H.)**

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan. Adapun rumusan masalah penulis yaitu Bagaimanakah peran kepolisian resort Lhokseumawe dalam mengungkap tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe dan Apa sajakah hambatan Polisi Resort Lhokseumawe dalam menangani tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian penulis yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian resort Lhokseumawe dalam mengungkap tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Polisi Resort Lhokseumawe dalam menangani tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis dari penelitian peran resort lhokseumawe dalam penegakan hukum tindak pidana penadahan yaitu penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan pasal 480 ke 1 KUHP.

Penulis menyarankan kepada kepolisian resort lhokseumawe dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karena perbuatannya tersebut dapat meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan di harapkan kepada kepolisian resort lhokseumawe untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana penadahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penadahan, Polisi.

SUMMARY

ALDI PRAYOGI
180510209

**ROLE OF LHOKSEUMAWE RESORT
POLICE IN LAW ENFORCEMENT OF
PENADAHAN CRIME**

**(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. and Ferdy
Saputra, S.H., M.H.)**

The criminal act of extortion is an act that is prohibited by law, because the extortion is obtained by way of crime. The formulation of the author's problem is what is the role of the Lhokseumawe resort police in uncovering criminal acts of collection in the city of Lhokseumawe and what are the obstacles to the Lhokseumawe Resort Police in handling criminal acts of collection in the city of Lhokseumawe. The purpose of the author's research is to find out and analyze the role of the Lhokseumawe resort police in uncovering criminal acts of collection in the city of Lhokseumawe. And to find out and analyze the obstacles of the Lhokseumawe Resort Police in dealing with criminal acts of collection in the city of Lhokseumawe.

This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or direct interviews with related parties.

The results of the research obtained by the author from research on the role of the Lhokseumawe resort in enforcing the law of criminal acts of collection, namely the application of material criminal law to criminal acts of collection is correct because the defendant's actions only refer to one act, namely collection and criminal acts of collection committed by the defendant in accordance with the formulation of the article 480 to 1 of the Criminal Code.

The author suggests that the Lhokseumawe Resort Police can provide more severe sanctions for perpetrators of criminal acts of collection because their actions can unsettle the community and the application of light crimes does not have a deterrent effect on perpetrators and it is hoped that the Lhokseumawe Resort Police will socialize to the community about this crime. detention in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Law Enforcement, Gathering, Police.